

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1992, di Indonesia hanya terdapat satu Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia dan enam Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Eksistensi dan perkembangan lembaga keuangan syariah terjadi peningkatan yang luar biasa, sehingga sampai pada tahun 2012 sudah terdapat 11 Bank Umum Syariah, 24 Unit Usaha Syariah, dan 156 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dengan meningkatnya jumlah perbankan syariah tentunya akan berdampak positif bagi masyarakat untuk menjangkau jaringan perbankan syariah. Berdasarkan jumlah industri perbankan syariah, dapat terlihat berbagai fenomena seperti sudah seberapa besar pencapaian aset perbankan syariah, *market share* dan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

Berdasarkan data Bank Indonesia saat ini total aset perbankan syariah dari total aset perbankan di Indonesia sudah mencapai 174,09 trilyun, meningkat 37% per Oktober 2012 dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya di bulan yang sama yaitu sekitar 127,15 trilyun. Dengan memiliki aset yang sudah mencapai ratusan trilyun, memberikan indikasi positif bagi bank syariah dan memberikan kekuatan tersendiri bagi perbankan syariah untuk mendorong agar lebih banyak masyarakat yang bertransaksi di bank syariah dan mendorong berbagai kebijakan dari beberapa stakeholder untuk terus mendukung perkembangan perbankan syariah.

Pangsa pasar perbankan syariah sendiri tidak semulus peningkatan jumlah industri perbankan syariah dan aset yang dimilikinya. Sampai di penghujung tahun 2012, *market share* atau pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai 4,2%. Namun dengan keyakinan penuh, di tahun 2013 *market share* perbankan syariah akan mampu mencapai tingkat 5%.

Memiliki total aset yang besar dan *market share* yang terus bertambah walaupun perlahan, fenomena selanjutnya yang dapat terlihat adalah tingkat efisiensi perbankan syariah bila dibandingkan dengan bank konvensional. Belum lama ini di tahun 2012 ada sebuah lembaga yang bernama *Bisnis Indonesia Intelligence Unit* melakukan penelitian untuk ajang *Banking Efficiency Award* untuk seluruh perbankan di Indonesia sebanyak 120 bank termasuk di dalamnya perbankan syariah. Dari hasil yang didapat dan yang mendapatkan *award* hanya 18 bank yang berhak memperoleh penghargaan sebagai bank yang paling efisien, diantaranya Bank CIMB Niaga, BNI 46, BRI, Panin Bank, Bank Ina Perdana, Bank Mayora, Bank Sinar Harapan Bali, Bank Victoria Internasional, Prima Master Bank, BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Bank DBS Indonesia, Citibank, HSBC, dan terakhir Bank BRI Syariah (diurutkan dari yang paling efisien). Hasil memberikan rasa bangga di satu sisi namun di satu sisi lain rasa kecewa. Rasa bangga muncul ternyata bank syariah berhasil masuk dalam kategori dalam ajang *Banking Efficiency Award* ini namun dari sisi kecewanya dari sekian banyak perbankan syariah mengapa hanya satu dan itupun berada di urutan terakhir dari delapan belas bank yang paling efisien. Apabila ditarik kesimpulan, mayoritas perbankan syariah di Indonesia belum efisien

dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sedangkan bila masuk dalam kaidah Islam, kita harus menjauhi sifat *tabzir* atau boros. Seharusnya perbankan syariah yang berlandaskan ke-Islaman harus menjadi bank yang efisien dan semestinya dalam ajang *Banking Efficiency Award* tersebut perbankan syariah harus mendominasi tapi kenyataannya malah sebaliknya. Ketidakefisienan sebuah bank, tentunya akan berdampak pada merugikan nasabahnya sendiri karena menimbulkan kemungkinan menanggung *cost* bank yang biasanya dibebankan pada biaya *fee based income*. Ketidakefisienan bank syariah dapat menunjukkan bahwa kinerja dan praktek perbankan syariah masih kurang baik dalam hal pengelolaan sehingga mendapatkan cap tidak efisien.

Sepanjang tahun 2012, juga muncul beberapa persoalan mengenai perbankan syariah, di antara beberapa persoalan itu adalah masalah penarikan dana haji sebesar 12 triliun yang sebelumnya ditempatkan di sejumlah bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Alasan menteri agama mengenai penarikan dana haji adalah terkait keamanan dana haji bila bank tersebut bangkrut tetap tidak diganti 100% dan profitnya sedikit bila dana haji ditempatkan di lembaga bank. Hal ini pun menjadi pukulan telak bagi bank syariah yang belum bisa dipercaya untuk mengelola dana haji dan sempat disinyalir ada beberapa bank syariah yang hampir terganggu likuiditasnya terkait penarikan dana haji tersebut. Persoalan lain mengenai perbankan syariah adalah tentang akan adanya peraturan baru *Loan To Value (LTV)* Syariah karena Bank Indonesia merasa ini perlu dibuat mengingat kemungkinan ancaman resiko *NPF* diatas toleransi sebesar 5% bagi bank syariah itu sendiri. Langkah Bank Indonesia yang berniat mengatur *LTV* di

pembiayaan rumah (KPR) dan kredit kendaraan (KKB) bank syariah dinilai akan memberikan dampak baik bagi perbankan syariah. Pengamat perbankan syariah Adiwarman Azwar Karim mengatakan, langkah ini dapat menekan *NPF* dan *bubble* akibat dana yang mengalir ke pembiayaan KPR dan KKB terlalu besar. Para ahli mengatakan sebaiknya aturan *LTV* bank syariah tidak disamaratakan dengan bank konvensional. Pendapat ini diperkuat dengan fakta yang ada pada bank syariah, yaitu dengan *down payment* rata-rata 15% untuk KPR dan KKB, *NPF* yang dihasilkan hanya mencapai 1%.

Di luar persoalan-persoalan yang terkait dengan perbankan syariah, kinerja keuangan perbankan syariah terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2011, diketahui bahwa dari sisi resiko kredit yang tercermin pada rasio *NPF* perbankan syariah mengalami penurunan menjadi 2,5% dari tahun sebelumnya sebesar 3%. Angka tersebut merupakan pencapaian terbaik selama lima tahun belakangan ini. Sementara itu pendapatan operasional perbankan syariah pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada kelompok BUS dan UUS, pendapatan operasional per akhir tahun 2011 tercatat sebesar Rp 14,9 triliun atau meningkat sebesar 49,4% (*yoy*), sedangkan pada BPRS peningkatan pendapatan mencapai 22,2% (*yoy*). Biaya operasional BUS dan UUS sepanjang tahun 2011 juga mengalami peningkatan, namun dengan laju pertumbuhan lebih rendah dibandingkan pendapatan operasional, yaitu sebesar 43,6% (*yoy*). Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan biaya tenaga kerja yang mencapai 56,9% (*yoy*). Pencapaian (kenaikan) produktivitas aset dan efisiensi

tersebut telah meningkatkan *net operational margin* BUS dan UUS dari 1,7% pada tahun lalu menjadi 1,9% pada akhir periode laporan. Sejalan dengan hal itu, profitabilitas BUS dan UUS mengalami peningkatan. Selama tahun 2011 laba BUS dan UUS tumbuh 40,3% menjadi Rp1,5 triliun. Dari sisi tingkat pengembalian aset, peningkatan laba tersebut berdampak pada kenaikan *ROA* dari 1,7% pada tahun 2010 menjadi 1,8% pada tahun 2011. Dibandingkan dengan perbankan seCARa nasional yang memiliki *ROA* diatas 3%, tingkat profitabilitas bank-bank syariah tersebut sebenarnya masih cukup bersaing, mengingat pada bank-bank syariah kontribusi pendapatan dari kegiatan non operasional relatif terbatas. Pada tahun 2011 permodalan bank-bank umum syariah seCARa umum meningkat. Selain didukung oleh pertumbuhan laba yang tinggi, peningkatan tersebut terutama ditunjang oleh penambahan modal disetor yang mencapai 28,5% (*yoy*). Dalam hal ini, kapasitas permodalan mengantisipasi risiko (*risk bearing capacity*) yang tercermin dari jumlah modal inti dan modal pelengkap meningkat, masing-masing sebesar Rp1,8 triliun atau 23,2% (*yoy*), dan Rp0,8 triliun atau 70,4% (*yoy*). Sementara itu pertumbuhan ATMR tercatat sebesar Rp14,6 triliun atau 27,4% (*yoy*), atau lebih rendah dari pertumbuhan kedua komponen permodalan tersebut, sehingga *CAR* bank-bank umum syariah sedikit meningkat dari 16,25% pada tahun 2010 menjadi 16,63% pada akhir 2011. Kondisi tersebut mengindikasikan tingkat ketahanan risiko bank-bank umum syariah yang cukup memadai yang tercermin dari *CAR* yang melebihi standar sebesar 8%, dan juga rasio modal inti terhadap ATMR yang mencapai 13,9%.

Kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting mengingat bank merupakan bisnis kepercayaan, dengan kinerja keuangan yang semakin baik, maka semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank bersangkutan. Salah satu peningkatan kinerja keuangan adalah dengan meningkatkan profitabilitas bank. Profit yang dihasilkan oleh bank syariah tidak hanya mempengaruhi tingkat bagi hasil bagi pemegang sahamnya, tetapi juga mempengaruhi tingkat bagi hasil yang diterima oleh para nasabah penyimpan dana. Oleh karena itu, bank syariah harus terus meningkatkan profitabilitasnya.

Profitabilitas biasanya diukur menggunakan rasio *Return On Equity (ROE)* atau *Return On Asset (ROA)*. Namun, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian *ROA* daripada *ROE* karena *ROA* mementingkan nilai profitabilitas yang dihasilkan dari aset yang sebagian besar merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat.

Kinerja bank juga mencerminkan kesehatan bank tersebut. Kesehatan bank berdasarkan Surat Edaran BI No. 9/24/DPbs dipengaruhi oleh faktor CAMELS (*Capital, Asset, Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*). Aspek *Capital* meliputi *CAR (Capital Adequacy Ratio)*, aspek *Asset Quality* meliputi *NPF (Non Performing Financing)*, aspek *Earnings* meliputi *ROE (Return On Equity)*, *ROA (Return On Asset)*, dan *Operational Efficiency Ratio (BOPO)*, dan aspek *Liquidity* meliputi *FDR (Financing to Deposit Ratio)*.

Dengan memiliki rasio kecukupan modal yang tinggi atau di atas standar minimum 8% seperti yang ditentukan oleh BIS (*Bank for International*

Settlements), diharapkan bank mampu mengatasi kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari sehingga bank dapat mengelola kegiatan operasionalnya dengan efisien dan menghasilkan *earnings* yang semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin kecil risiko suatu bank maka semakin besar keuntungan yang diperoleh (Kuncoro dan Suharjono, 2002) dalam Arimi dan Mahfud (2012). Hal ini menunjukkan adanya hubungan berbanding lurus antara *CAR* dengan *ROA*.

Menurut Riyadi (2006) dalam Prariwi dan Mahfud (2011) semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya hubungan berbanding terbalik antara BOPO dengan *ROA*. Semakin kecil BOPO, *ROA* meningkat. Nilai BOPO yang kecil didapatkan apabila peningkatan pendapatan operasional jauh lebih tinggi daripada biaya operasional. Apabila pendapatan besar, biaya yang dikeluarkan sedikit, maka menghasilkan laba yang besar.

Non Performing Financing (NPF) berkaitan dengan risiko kredit. *NPF* merupakan perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang ada. Apabila semakin rendah *NPF* maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat *NPF* tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet (Kharsima, 2012). Dengan kata lain *NPF* berbanding terbalik dengan *ROA*.

Pada kenyataannya hubungan antara rasio-rasio tersebut tidak selalu sesuai dengan konsep yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Ini dapat dilihat dari table pergerakan rasio- rasio keuangan perbankan syariah berikut :

Tabel 1.1

Rasio-rasio Perbankan Syariah 2005-2010

Indikator (%)	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ROA	1,35	1,55	2,07	1,42	1,48	1,67
CAR	12,41	13,42	10,67	12,81	10,77	16,25
BOPO	78,91	76,77	76,54	81,75	84,39	80,54
NPF	2,81	4,76	4,05	3,95	4,01	3,02
FDR	97,75	98,9	99,76	103,65	89,7	89,67

Sumber: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah

Berdasarkan tabel, pergerakan rasio-rasio keuangan dari tahun 2005 ke 2006 terdapat hubungan yang menyimpang antara *NPF* dengan *ROA*, yaitu pada saat pembiayaan yang bermasalah meningkat, laba yang diperoleh bukan menurun tetapi mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 dan 2009, pada saat rasio kecukupan modal mengalami penurunan, *ROA* tetap ada peningkatan. Namun pada tahun 2008, saat *ROA* menurun rasio kecukupan modal bertambah dan *NPF* mengalami penurunan.

Fenomena seperti ini juga terdapat pada hasil penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Dhian Dayinta Pratiwi dan Kholiq Mahfud (2010) yang menghasilkan adanya hubungan negatif antara *CAR*, *BOPO*, dan *NPF* secara

parsial berhubungan negative dengan *ROA*. Sementara FDR berpengaruh positif terhadap *ROA*.

Di sisi lain, kinerja keuangan bank juga dapat dipengaruhi faktor lain selain faktor CAMEL. Salah satunya adalah ada tidaknya pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh bank (*Corporate Social Responsibility Disclosure*) seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2007), Rettab et al. (2008), Vergalli et al (2009) dalam penelitian Wijayanti dan Sutaryo (2011) yang menemukan adanya hubungan yang signifikan antara *CSR* dengan kinerja keuangan. Pernyataan ini sependapat dengan Chung et al. (2008) dalam Wijayanti dan Sutaryo (2011) yang berpendapat bahwa perusahaan yang mengungkapkan *CSR* lebih banyak maka kinerja keuangan perusahaan cenderung meningkat. Keadaan ini didukung dengan data pada penelitian yang dilakukan Sofyani dkk (2011) yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja sosial bank syariah Indonesia dari 64,04% di tahun 2009 menjadi 66,67% di tahun 2010, dimana pada saat yang bersamaan, *ROA* yang terdapat dalam data LPPS juga mengalami kenaikan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Sutaryo (2011) sendiri menemukan hasil bahwa *CSR* hanya berpengaruh pada *ROE*, tidak berpengaruh terhadap *ROA* dan *EPS*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adhima (2011) menemukan bahwa *CSR* khususnya yang terkait dengan aspek HAM, praktik kerja, masyarakat dan tanggung jawab produk berpengaruh negative terhadap *ROA*.

Berdasarkan *gap* yang terdapat di antara keadaan yang sebenarnya dengan konsep atau teori yang ada, serta didukung oleh adanya hasil penelitian yang tidak

konsisten dari peneliti-peneliti terdahulu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh *CAR*, *BOPO*, *NPF* dan *CSR Disclosure* terhadap *ROA* Perbankan Syariah”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *CAR* memiliki pengaruh terhadap *ROA*?
2. Apakah *BOPO* memiliki pengaruh terhadap *ROA*?
2. Apakah *NPF* memiliki pengaruh terhadap *ROA*?
3. Apakah *CSR Disclosure* memiliki pengaruh terhadap *ROA*?
4. Apakah *CAR*, *BOPO*, *NPF*, dan *CSR Disclosure* secara simultan memiliki pengaruh terhadap *ROA*

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *CAR* terhadap *ROA*
2. Untuk mengetahui pengaruh *BOPO* terhadap *ROA*
3. Untuk mengetahui pengaruh *NPF* terhadap *ROA*
4. Untuk mengetahui pengaruh *CSR Disclosure* terhadap *ROA*
5. Untuk mengetahui pengaruh *CAR*, *BOPO*, *NPF*, dan *CSR Disclosure* secara simultan terhadap *ROA*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh *CAR*, *BOPO*, *NPF*, dan *CSR Disclosure* terhadap *ROA*
2. Menjadi landasan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian serupa dan referensi mereka dalam mempelajari perbankan terutama dalam menganalisis profitabilitas perbankan syariah.
3. Menjadi tambahan informasi bagi masyarakat, khususnya industri perbankan dan pihak luar seperti investor dan kreditur untuk mengetahui profitabilitas sebuah bank.